

SEKOLAH MULAI JAM 5 PAGI: WAJARKAH? WARASKAH?

Viral NTT – 4 Maret 2023

"Sekolah jam 5 pagi...
Wajar kah?? Waras kah??"

Kebijakan mulai sekolah jam 5 pagi menjadi cerita panjang masyarakat NTT. Jika mau, banyak komentar dari masyarakat provinsi lainnya, bahkan komentar masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berada di Negara-negara maju...

Tidak hanya itu...
Media-media lokal, nasional, bahkan internasional menjadikannya topik utama pemberitaan...

10 Sekolah telah dijadikan obyek uji coba kebijakan ini...

Ikuti acara VIRAL NTT
Radio TIRILOK FM101.1MHz
Kupang

Narasumber:

- Prof. Dr. SIMON SABON OLA, M. Hum. (Guru Besar Universitas Nusa Cendana)
- Ana Waha Kolin (Anggota DPRD Prov. NTT Fraksi Kebangkitan Bangsa)

0812-4689-8828
APP <https://tirilok.com/app> **Live** → Text & Audio
YouTube <https://tirilok.com/link.php>

Bersama Host: Isidorus Lilijawa **VIRAL NTT**
Sabtu, 04 Maret 2023 Pukul 08:00 di Radio TIRILOK Kupang

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Linus Lusi menginstruksikan kepada 10 SMA/SMK yang ada di Kota Kupang untuk mulai melakukan pembelajaran jam 05.00 pagi. Keputusan itu diambil dalam pertemuan bersama dengan para kepala sekolah.

Tujuannya adalah agar SMA di NTT bias tembus 200 SMA terbaik nasional, dan lulusan SMA/SMK di NTT bias kuliah di UI, UGM, ITS bahkan Harvard University. Tujuan lain adalah untuk meningkatkan disiplin peserta didik, merestorasi Pendidikan di NTT, memacu semangat belajar.

Kebijakan ini sudah mulai dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2023. Riuuh rendah suara-suara public merespon pemberlakuan kebijakan ini. Bahkan sudah menjadi pembicaraan nasional. Para pakar turun gunung untuk memberikan pendapat dan pandangannya. Bahkan Menteri dalam kabinet pun turut berkomentar. Ada surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi dan Menteri Pendidikan untuk membatalkan kebijakan ini.

Pertanyaannya, apakah kebijakan sekolah mulai jam 5 pagi ini hasil dari oleh pikir, olah rasa, olah karsa yang wajar dan waras? Mari kita bedah.

Ketidakwajaran

Dinas Pendidikan Provinsi NTT mendesain konsep sekolah mulai jam 5 dengan maksud untuk menjadi pembeda dari daerah lain di Indonesia bahkan dunia. Karena mau buat yang berbeda, yang lain, maka konsep ini dinilai tidak wajar, tidak sebagaimana biasanya. Jam mulai sekolah untuk SMA di Indonesia itu jam 07.00. Ini sudah berlaku umum dari dulu dan ada basis regulasinya, ada kajian *scientific* dan klinisnya. Namun, secara serta merta di NTT gubernur dan dinas pendidikan mendesain kebijakan ini. Argumentasinya, dalam pertemuan bersama para kepala sekolah ada 10 SMA/SMK yang mau mengikuti 'pendekatan baru' ini.

Pertanyaanya mengapa tidak dimintai dulu kesepakatan orang tua dan peserta didik? Bukankah esensi pembelajaran berbasis kurikulum merdeka adalah mengutamakan kepentingan peserta didik?

Konsep dan kebijakan pendidikan yang tidak wajar ini menimbulkan berbagai ekses.

Pertama, ada yang tidak wajar bagi peserta didik ketika mereka harus bangun lebih awal, mengingat jam 5 pagi pelajaran sudah dimulai di sekolah. Itu berarti mereka harus bangun jam 4 pagi. Setelah itu bersiap-siap (mandi, berpakaian) lalu sarapan pagi. Setelah itu, kesekolah. Bagi yang punya kendaraan sendiri atau orang tua memiliki kendaraan pribadi, maka dengan mudah mengantar anaknya ke sekolah. Tetapi bagi orang tua yang tidak mempunyai kendaraan, anak-anak harus ke tempat yang dilewati kendaraan umum (bemo/angkot/ojek). Itu berartianak-anak mesti berjalan dalam kegelapan. Ada risiko soal keselamatan anak-anak dalam perjalanan. Ditambah lagi, di jam seperti itu (4.30 pagi) apakah kendaraan sudah mulai beroperasi? Jika belum, bagaimana nasib anak-anak ini? Ini tentu mencemaskan dan menggalaukan tidak saja bagi anak tetapi bagi orang tua.

Kedua, dengan bangun lebih awal efeknya adalah anak-anak bias saja mengantuk di kelas. Karena kepagian bangunnya, maka suasana batin dan mood belum tentu baik untuk memulai pembelajaran jam 5 pagi. Apalagi dengan kondisi rumah yang jauh dari sekolah dan pengalaman cemas saat berjalan mendapatkan tumpangan ke sekolah. Hal-hal ini turut menyebabkan peserta didik tidak siap untuk mulai proses belajar jam 5 pagi. Tidak heran jika jam-jam pelajaran seharian adalah jam-jam yang melelahkan dan memicu rasa kantuk yang luarbiasa.

Ketiga, bagi para guru ini adalah tantang anter sendiri. Sebagai yang memberikan teladan, para guru tentu sudah harus berada di sekolah sebelum jam 5 pagi. Anda bayangkan. Jam berapa mereka harus bangun, kapan mesti menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anaknya di rumah. Bagaimana jika guru perempuan masih mempunyai anak bayi atau anak-anak berusia TK – SD. Dalam kondisi macam begini, kehadiran mereka di sekolah di pagi hari itu tentu dalam kondisi psikis maupun fisik yang belum siap untuk mengajar.

Keempat, bagi orang tua kebijakan sekolah jam 5 pagi ini bukan perkara gampang. Karena ritme dalam rumah berubah. Ada beban psikis (kecemasan, ketakutan) ketika anak-anak harus ke sekolah di pagi buta. Apa lagi tidak dengan kendaraan sendiri. Belum lagi mendamaikan anak-anak yang sudah harus ditinggal pergi bapak atau ibunya ke sekolah di saat dini hari. Ditambah lagi ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang biasanya dilakukan oleh anak-anak (mencari makanan hewan, membersihkan rumah, membereskan perlengkapan makan) pada akhirnya dikembalikan kepada orang tua. Untuk kalangan tertentu juga, waktu di pagi hari biasanya dimanfaatkan untuk mengikuti sholat di masjid atau misa di gereja. Dengan sekolah jam 5 pagi, otomatis rutinitas ini ditiadakan.

Ketidak wajaran-ketidak wajaran di atas yang diakibatkan oleh kebijakan yang tidak wajar justru mengganggu ekosistem pendidikan itu sendiri. Maka bagi saya tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan pemberlakuan sekolah jam 5 pagi ini mustahil terpenuhi justru karena aneka



ketidakwajaran itu. Pada akhirnya kualitas belajar peserta didik bukan semakin baik tetapi bias saja merosot. Semangat belajar bias saja menurun dan kreativitas para guru untuk mengajar pun *stagnan* akibat beban psikis dan beban rumah tangga yang harus mereka pikul.

Dalam beberapa hari terakhir, sekolah jam 5 pagi ini menjadi trending topik di NTT, menggosok viralnya kasus Bank NTT, kasus 'kuahkosong' TPP untuk ASN dan

problem tenaga honor.

Apakah kebijakan sekolah jam 5 pagi ini suatu tindakan *by design* untuk pengalihan isu? Untuk pembentukan opini publik? Mungkin saja. Tetapi yang jelas, di ruang-ruang publik, di sosial media (youtube, FB, WA, tiktok, twitter, IG), di media lokal dan nasional, topic ini menjadi viral dan ramai dibedah, dibahas, tentu dengan tambahan macam-macam bumbu dan joke.

Bagi saya, kebijakan sekolah mulai jam 5 pagi ini perlu dibedah dengan pisau analitis 'kewajaran' dan 'kewarasan'. Tentu itu esensi suatu kebijakan publik. Mesti memenuhi minimal kualitas ini, kewajaran dan kewarasan. Apakah kebijakan sekolah mulai jam 5 pagi ini hasil dari oleh pikir, olah rasa, olah karsa yang wajar dan waras?

Banyak kalangan menilai kebijakan sekolah jam 5 pagi ini tidak punya dasar kajian yang rasional dan komprehensif. Kalau ada kajian rasional, maka ketidak wajaran dan ketidak warasan itu bias dicegah dan diminimalisir.

Hal yang tidak logis adalah menghubungkan masuk sekolah jam 5 pagi dengan terbangunnya kualitas pendidikan dan meningkatnya kecerdasan peserta didik. Seolah-olah semakin awal jam sekolah, semakin mudah pintar peserta didiknya. Ini kan sesat pikir (*fallacy*). Padahal orang-orang waras paham betul faktor-faktor apa yang harus diperhatikan untuk mengasilkan lulusan yang bermutu dan meningkatkan kecerdasan peserta didik.

Ketidakwarasan

Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pendidikan mestinya punya *grand design* atau cetak biru (*blue print*) pendidikan di NTT. Ini yang menjadi rujukan pengambilan kebijakan di aspek Pendidikan. Bukan kebijakan yang tiba-tiba muncul, yang mimpi semalam lalu keesokan dieksekusi. Untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di NTT, agar lulusan SMA/SMK di NTT

bias masuk UI, UGM, ITS bahkan Harvard, supaya SMA/SMK di NTT bisa bersanding di 200 sekolah terbaik di Indonesia, maka rumusnya bukan sekolah jam 5 pagi. Bukan itu. Tetapi beberapa hal berikut ini:

Pertama, pemerintah dan Dinas Pendidikan harus mendesain program yang menghasilkan guru-guru berkualitas tinggi. Guru – guru di sekolah mesti memiliki integritas, komitmen dan tanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas. Mereka harus memiliki kecakapan penguasaan materi, dan yang paling utama adalah memiliki kemampuan menerapkan metode pembelajaran siswa aktif. Karena itu, pemerintah harus juga memperhatikan kesejahteraan para guru, dan terus meng-*upgrade* kemampuan mereka melalui berbagai pengembangan kapasitas.



Kedua, faktor kepala sekolah sangat penting. Kepala sekolah mesti memiliki kemampuan manajerial yang handal. Sebagai manajer di sekolah, kepala sekolah harus paham manajemen sekolah; bias membangun komunikasi dan koordinasi dengan guru-guru; sanggup menciptakan iklim yang kondusif dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Karena itu, kepala sekolah haruslah dipilih dari antara yang terbaik, yang profesional dan cerdas. Bukan dipilih atas dasar *like and dislike* atau karena pendekatan politik dan sentiment etnis dan agama.

Ketiga, untuk mendongkrak kualitas pendidikan di NTT, sarana dan prasarana serta fasilitas pembelajaran harus disiapkan dengan baik. Selain gedung sekolah yang layak, di sekolah harus ada laboratorium, ruang IT dan fasilitas penunjang lainnya. Tanpa sarana dan prasarana pendukung yang memadai, mimpi untuk wujudkan kualitas pendidikan yang bersaing dengan sekolah-sekolah di luar NTT hanyalah mimpi besar di siang bolong. Fakta hari ini, masih banyak sekolah-sekolah di NTT yang belum layak untuk proses belajar-mengajar karena terbangun seadanya. Kadang-kadang perlu dipertanyakan keberpihakan pemerintah dalam kondisi macam ini.

Keempat, ekosistem pendidikan yang baik memberikan ruang kontrol yang kuat secara berjenjang (dari gubernur, bupati/walikota, dan kepala dinas pendidikan di semua tingkatan). Yang paling penting juga soal dukungan orang tua. Karena itu, demokratisasi di sekolah harus dibangun. Pihak dinas pendidikan tidak boleh menjadi pihak yang mau mengatur segalanya. Pihak sekolah juga tidak harus membeo untuk berbagai kebijakan dinas terkait. Orang tua perlu dilibatkan dalam berbagai proses pengambilan keputusan yang berdampak terhadap kepentingan peserta didik.

Kelima, untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, pemerintah mesti berani mengembangkan *boarding school* (sekolah berasrama). Niat pemerintah untuk menjadikan 2 sekolah di Kota Kupang sebagai *pilot project* itu harus ditunjang dengan manajemen *boarding school*. Contoh pembelajaran berbasis *boarding school* seperti di seminari dan pesantren harus ditindak lanjuti dengan kajian-kajian dan diskusi ilmiah. Mesti ada ruang pendekatan *scientific* untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan pendidikan. Tidak boleh hanya karena dorongan yang sekejap, tiba-tiba, serta-merta tanpa memperhitungkan *blue print* pendidikan. Kebijakan sekolah jam 5 pagi, yang kemudian direvisi menjadi 5.30 pagi tetaplah menjadi bola panas di kalangan masyarakat NTT. Ada pro dan kontra. Ada eksplanasi dan klarifikasi. Apa pun narasi yang terbangun dalamkaitannya dengan itu, bagi saya kebijakan sekolah jam 5 pagi tetaplah layak untuk dipertanyakan bahkan digugat dari sisi kewajaran dan kewarasan.